

EDISI 6 | JUNI 2023

PARLEMEN

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

LAPORAN UTAMA:

SEKOLAH MINIM SISWA HARUS REGROUPING?



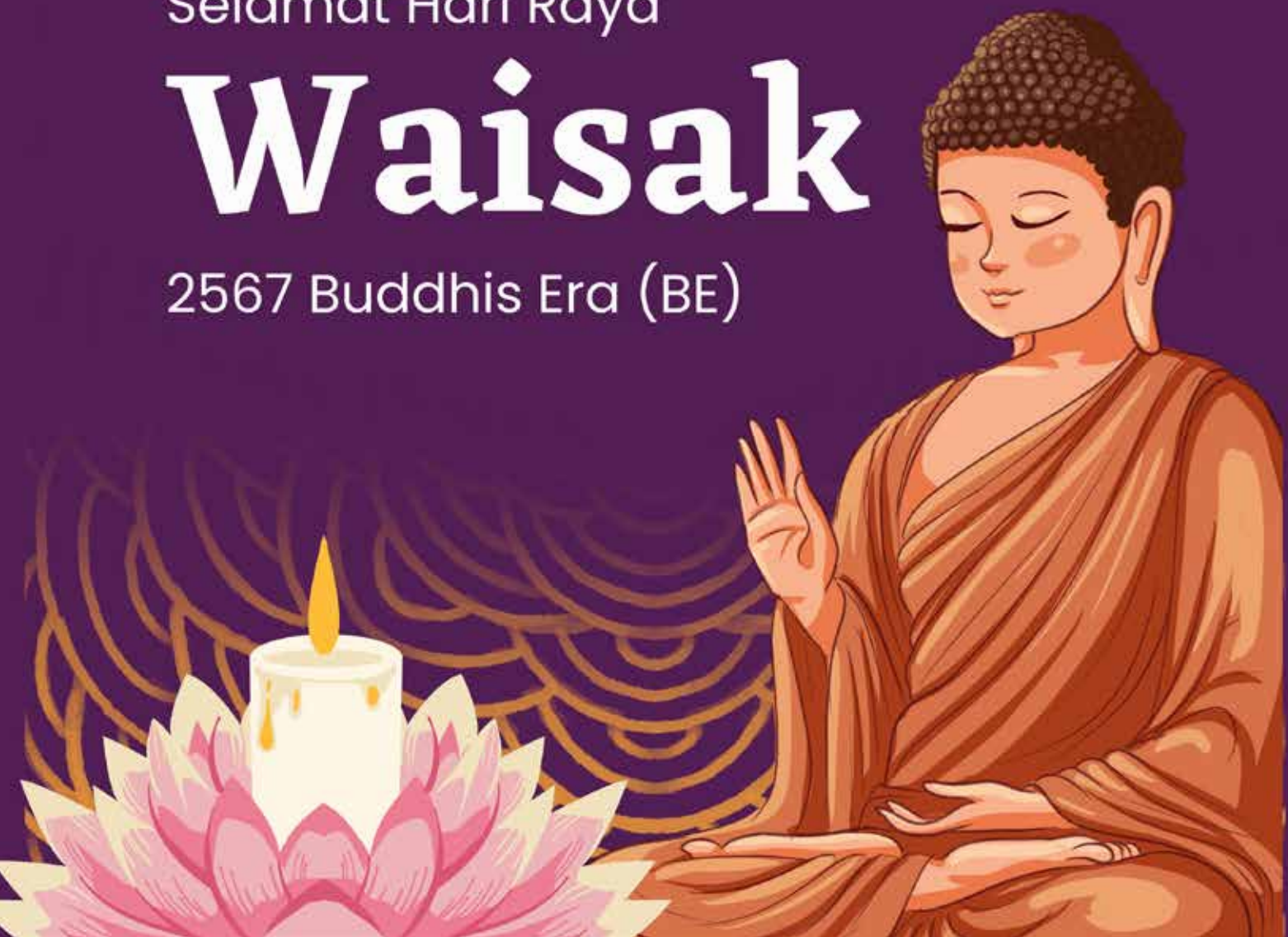


PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SUMENEP
MENGUCAPKAN

Selamat Hari Raya

Waisak

2567 Buddhis Era (BE)



Dari Redaksi

Pembaca yang budiman...
Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Kami juga menerima tulisan berbentuk opini, artikel dan kolom. Anda bisa mengirimkan melalui :

Email:
redaksi.majalahparlemen@gmail.com
Website:
www.dprd-sumenepkab.go.id
SMS center:
085942803888

Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Redaksi



M A J A L A H PARLEMEN

Penerbit:

Sekretariat DPRD Sumenep

Pelindung:

Ketua DPRD Sumenep

Pembina:

Drs. Fajar Rahman, M.Si
(Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab:

Hasan Bashri, SH
(Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)

Dewan Redaksi:

Herman, S.Sos, M.Si
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)

Siti Hairunnisyak, SE
(Perisalah Legislatif Ahli Muda)

Yuni Kurniawati, SH
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)

Staf Redaksi:

Desy Warsiyanti, SE
Ainur Rofiq, SH
Mohammad Yahya N., S.Ap

Reporter:

Salamet
Andreas Nugroho, A.Md.Kom

Fotografer:

Ibnu Fajar, S.Sos

Lay outer & Grafis:

DAV Production

Alamat Redaksi & Sirkulasi:

Bagian Persidangan
dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kab. Sumenep
Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

DAFTAR ISI

04

Laporan Utama
Sekolah Minim Siswa,
Harus Regrouping?

20

Parlementaria
Dinilai Stagnan, Dewan
Soroti PAD Sumenep

11

Fokus
Raperda Pajak dan
Retribusi Tersendat
Harmonisasi

28

Eksplor Wisata
Anda Suka Menyelam,
Datang ke Pulau
Sapeken

14

Parlementaria
Panggil OPD, Pastikan
realisasi Kegiatan 2022

30

Tempo Doeloe
Masa Jepang, Sumenep
Hanya Punya Pendi-
dikan SR

16

Parlementaria
Ungkap Kesulitan Kios
Tebus Pupuk Bersubsidi

32

Artikel
Second Wind

18

Parlementaria
Desak Perbaikan Jalan
Tamidung-Gapura
Tengah

34

Artikel
Pohon Mangga Tua di
Depan Rumah

SAPA REDAKSI



HASAN BASHRI, SH
Pemimpin Redaksi

Kerja anggota DPRD Sumenep patut diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Sumenep. Sebab, tanpa waktu lama, para wakil rakyat itu berhasil menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati untuk anggaran tahun 2022 lalu. Ini menandakan jika kinerja dewan cukup baik, dan tidak perlu diragukan lagi. Tuntasnya raperda tersebut tentu saja salah satu indikasi jika para legislator itu bekerja dengan sepenuh hati.

Memang, tidak mudah dalam melakukan proses pembahasan raperda tersebut, membutuhkan perjuangan ekstra. Itu lantaran tugas lain yang cukup padat dari para anggota dewan menunggu. Namun, berkat kemauan dan kegigihan untuk bisa mengantarkan raperda tersebut tuntas dibahas dan diparipurnakan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan mampu memberikan perbaikan pada kegiatan pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya. Semuanya bermuar pada pembangunan yang lebih

baik, untuk kesejahteraan masyarakat.

Harus diakui, membahas LKPJ membutuhkan konsentrasi penuh. Di samping soal angka, juga berkaitan dengan program yang sudah dilaksanakan. Makanya, para wakil rakyat tidak hanya berkutat di urusan draf, melainkan harus turun ke lapangan untuk memastikan validitas data yang disampaikan oleh bupati. Dan, memastikan kesesuaian data dengan yang terjadi di lapangan. Harapannya, raperda tersebut bisa berkualitas.

Sebenarnya, anggota dewan tidak hanya sekadar membahas raperda LKPJ, namun ada beberapa raperda yang juga sudah masuk bahasan. Salah satunya, ada raperda pajak dan retribusi daerah, raperda SO (struktur organisasi) dan lainnya. Dan, semuanya sudah ditekenuhi dan akan dituntaskan dalam waktu dekat. Semoga sajian majalah parlemen kali ini bisa memberikan pengetahuan atas kerja dan perjuangan anggota dewan untuk Kabupaten Sumenep tercinta. •

SEKOLAH MINIM SISWA, HARUS REGROUPING?

Masalah pendidikan ternyata menjadi atensi dari anggota dewan yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati terkait realisasi anggaran di tahun 2022 lalu. Sebab, pansus menemukan berbagai persoalan di dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep. Sehingga, menjadi wajar ketika pendidikan menjadi pembahasan khusus.



LAPORAN UTAMA



Dalam bahasan para legislator itu tidak hanya berkuat soal fasilitas, melainkan juga keberadaan siswa dan tenaga pendidiknya, termasuk juga mutu pendidikan. Bahkan, rekrutmen siswa atau Penerimaan Pendaftaran siswa baru tidak lepas dari perhatian mereka. Maklum, semua komponen tersebut dipastikan saling berhubungan satu sama lain, baik untuk kemajuan atau terhambanya pendidikan di kota Sumekar itu.

Salah satu point yang direkomendasikan pansus adalah banyaknya lembaga pendidikan, utamanya SD (Sekolah Dasar) yang memiliki siswa sangat minim. Bahkan, ada yang tidak memiliki di tahun ajaran baru ini. Itu mengindikan jika minta masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri ternyata sudah mulai menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ternyata, banyak yang memilih untuk sekolah lembaga swasta seperti MI (Madrasah Ibtidaiyah).

Kondisi ini tentu sangat miris sekali, sebab sekolah yang dirintis sejak dulu kala ternyata kalah “ber-



LAPORAN UTAMA



saing” dengan lembaga pendidikan swasta. Sehingga, pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam hal ini dinas pendidikan (Disdik) tentu saja harus melakukan evaluasi secara menyeluruh agar keberadaan SD tidak mati suri. Meski sebenarnya realitas semacam ini sudah cukup lama terdengar dan terlihat, namun ternyata belum ada terobosan dari instansi terkait.

Oleh karenanya, pansus mendorong pelaksanaan regrouping (penggabungan) sekolah bagi siswanya minim dengan lembaga yang lebih dekat. Hal itu dilakukan untuk efisiensi anggaran dan tena-

ga pendidik. Sebab, apabila tidak dilakukan penggabungan, maka bisa saja kelebihan guru yang bermuara pada beban kerja tenaga pendidik yang tidak maksimal. Sehingga, regrouping itu harus dilakukan oleh Pemkab Sumenep.

Dorongan kuat atas pelaksanaan regrouping tersebut tentu dipicu dengan kondisi di lapangan. Di mana pansus turun langsung ke sekolah untuk memastikan jumlah siswa sebagaimana yang dilaporkan masyarakat. Ternyata, ditemukan sekolah yang sangat minim siswanya. Salah satunya, di SD

Desa Batu Putih Kecamatan Batu Putih, SDN Desa Basoka dan SDN Desa Bun Barat Kecamatan Rubaru. Dari hasil temuan itu, maka solusi yang harus diambil adalah regrouping.

Selain soal regrouping, pansus juga menyorot sejumlah bangunan sekolah yang tidak layak untuk dilakukan perbaikan memadai. Sehingga, alokasi bantuan juga harus diprioritaskan kepada lembaga pendidikan yang gedungnya sudah mengalami kerusakan parah. Sehingga, nantinya siswa tidak akan menjadi korban saat melangsungkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Diakui, dana untuk sarana prasarana (sarpras) pendidikan ter-



LAPORAN UTAMA



bilang cukup besar, apalagi melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, formulasi pemberian bantuan harus dievaluasi, agar tepat guna, dan tepat sasaran. Sehingga, bantuan tersebut bisa menyasar kepada lembaga yang memang membutuhkan. Sehingga, tidak ada keluhan dari masyarakat.

Disamping itu, pemerintah juga mulai berfokus dalam peningkatan mutu pendidikan. Sehingga, melahirkan generasi yang berkualitas. Tentu saja hal ini harus berkelindan dengan kualitas dari tenaga

pendidikannya. Di setiap saat, kapasitas guru untuk terus diupgrade, agar bertambah, seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sehingga, generasi emas di Kota Sumekar itu tetap terjaga.

Pansus juga mendorong instansi terkait untuk melakukan penerbitan saat PPDB tahun ajaran baru. Di mana para wakil rakyat itu masih mendapatkan keluhan adanya pungutan liar (pungli) saat penerimaan siswa baru. Padahal, pendidikan saat ini sudah tidak dibebankan kepada

siswa. Pungli dengan dalih apapun jelas tidak boleh, dan harus menjadi perhatian dari disdik. Dan, harus ditindak tegas.

Selain masalah pendidikan, infrastruktur jalan juga tidak lepas dari amatan dari pansus LKPJ. Guna meningkatkan kualitas jalan yang ada di Kabupaten ujung timur Pulau Madura itu, para legislator menginginkan penggunaan teknologi aspal buton (Asbuton). Sebab, kualitas aspal tersebut dinilai cukup baik dibandingkan dengan yang lainnya. Apalagi, penggunaan jalan lapen yang hanya bisa digunakan terkadang seumur jagung.

Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dalam pembangunan dan preservasi jalan yang di seluruh pelosok kota sumekar itu. Pertimbangan lain, lantaran keberadaan asbuton dinilai lebih awet. Maka, pihaknya merekomendasikan semua pembangunan jalan untuk menggunakan asbuton. Tentu saja, biayanya lebih mahal, namun kualitas juga lebih tahan lama. Ingat!, Jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam membuka akses ekonomi.

Pemerintah diminta juga tidak melupakan perbaikan jalan yang sudah terlanjur rusak. Namun, dalam pelaksanaannya hendaknya dilakukan dengan melakukan pendataan yang baik dan sempurna. Yakni, melakukan pemetaan antara yang rusak ringan, sedang maupun berat. Sementara dalam perbaikannya hendaknya mendahulukan jalan yang sudah mengalami kerusakan sangat berat.

Pengelolaan destinasi wisata yang terkesan jalan di tempat ternyata juga menjadi atensi dari para leg-



LAPORAN UTAMA



islator. Sebab, sejumlah wisata yang dikelola oleh pemerintah ternyata tidak mengalami perkembangan signifikan. Bahkan, fasilitas yang ada di dalam destinasi tersebut ternyata tidak mampu menarik wisatawan berkunjung. Apalagi, memang fasilitasnya sangat minim, dan tidak ada penambahan setiap tahunnya.

Oleh sebab itu, dewan mendesak pemerintah untuk melibatkan pihak ketiga atau investor dalam pengelolaan destinasi wisata. Itu dilakukan lantaran anggaran yang dimiliki tidak akan mampu mencukupi dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Sebab, apabila tidak diserahkan kepada pihak ketiga maka dimungkinkan tetap stagnan, tidak ada perkembangan, lantaran hanya menggantungkan kepada anggaran negara.

Sebenarnya, masih rekomendasi yang disampaikan oleh pansus LKPJ bupati untuk anggaran 2022. Dan, semua rekomendasi tersebut sudah disampaikan dalam sidang paripurna, yang juga dihadiri eksekutif. Setidaknya rekomendasi yang disampaikan tersebut mampu ditindaklanjuti dan dijadikan bahan evaluasi pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan di kabupaten yang dipimpin Achmad Fauzi Wongsojudo itu. •



GALERI



Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep dipimpin Langsung Ketua Komisi H. Dulciam Beserta Anggota Melakukan Sidak Ke Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) di Desa Kalinganyar dan Pembangunan Pagar RSUD ABUYA Kecamatan Arjasa Pulau Kangean, 15 - 16 Juni 2023

RAPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI TERSENDAT HARMONISASI

Meski sudah dilakukan pembahasan, namun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak dan retribusi tersendat.



FOKUS

Sampai detik ini harmonisasi terhadap draf tersebut belum tuntas dilakukan. Padahal, pengusulan harmonisasi itu sudah diusulkan namun sampai detik ini juga belum dituntas. Sehingga, pembahasan secara intensif pun tidak bisa dilaksanakan oleh para wakil rakyat.

Padahal, Pemkab Sumenep sudah cukup lama mengajukan Harmonisasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur, atas pengajuan bagian hukum Setkab Sumenep, Madura. Sayangnya, harmonisasi itu tak kunjung tuntas sampai detik ini. Sebab, secara regulatif, untuk melakukan pembahasan selanjut-

nya harus menunggu hasil harmonisasi tersebut.

Sehingga, para legislator yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) itu menduga jika pemkab tidak serius dalam mengawal harmonisasi tersebut. Sehingga, prosesnya cukup panjang di Kemenkumham Jatim. Bayangkan, sudah cukup lama berkas ngendap di Jatim. Dimana menyebabkan pembahasan jadi tersendat dan tidak bisa dilanjutkan sampai harmonisasi itu tuntas dilaksanakan.

Anggota Pansus Raperda Pajak dan Retribusi H. Sami'oeddin menjelaskan, sesuai dengan regulasi yang baru maka semua raperda harus dilakukan harmonisasi ke Kemenkumham. Termasuk, pa-

jak dan retribusi itu. "Yang aneh sampai detik ini belum selesai dilakukan. Padahal, sudah lama dilakukan (harmonisasi, red)," katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku kecewa dengan lambannya harmonisasi tersebut. Sebab, sudah lebih satu bulan namun tak tuntas. Sehingga, pihaknya meragukan pengawasan dari Pemkab Sumenep atas Raperda tersebut. "Jadi, tidak bisa dibahas jika harmonisasi belum selesai. Apakah pengawasan Pemkab dalam hal ini bagian hukum tidak serius ke Kemenkumham sehingga cukup lama selesainya. Jadi jangan setengah hati," ungkapnya.

Sami'oeddin menuturkan, pi-

“

Kami menginginkan Raperda itu bisa dituntaskan tahun ini. Namun, pembahasan sempat tertunda dengan belum tuntasnya harmonisasi tersebut.



H. SAMI'OEDDIN
ANGGOTA PANSUS



haknya mendesak Pemkab serius untuk melakukan pengawalan harmonisasi tersebut. Mengingat Raperda tersebut sangat penting untuk Kabupaten Sumenep. Sebab, disamping berkaitan dengan masalah pendapatan daerah, juga berkaitan dengan masyarakat secara umum. Sehingga, membutuhkan kerja keras dari pemerintah dalam hal ini bagian hukum. Apalagi, pihaknya menginginkan raperda tersebut bisa dituntaskan tahun ini.

"Kami menginginkan Raperda itu bisa dituntaskan tahun ini. Namun, pembahasan sempat tertunda dengan belum tuntasnya harmonisasi tersebut. Sebab, Apabila tidak tuntas, maka nanti tidak bisa

melakukan pungutan pajak dan retribusi tahun depan," tukasnya.

Politisi asal Kecamatan Gapura itu meminta pemkab tidak hanya sekedar menunggu saja, melainkan harus jemput bola ke Kanwil Jatim. Sebab, apabila tidak terurus maka bisa saja tertindih dengan berkas yang baru datang. "Makanya, ini harus dikawal semaksimal mungkin. Sehingga bisa cepat dan pembahasan bisa dilakukan oleh dewan. Tahun ini bisa langsung tancap gas untuk penyelesaiannya," tuturnya.

Kabag Hukum Setkab Sumenep Hizbul Wathan menjelaskan, pihaknya sudah maksimal dalam mengawal harmonisasi Raperda pajak dan retribusi. Buktinya,

proses pengajuan sudah dilakukan pada Februari lalu. "Dan, baru dilakukan harmonisasi pada bukan April 2023 lalu," katanya.

Dia menuturkan, pihaknya sudah sering melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham, tapi belum selesai sampai detik ini. "Terus kita pantau termasuk di e Legal," ucapnya.

Memang, sambung dia, pihaknya tentu saja menunggu karena yang melakukan harmonisasi bukan pihaknya. Apalagi, memang secara regulasi tidak ada aturan tenggat waktu.

"Yang jelas, kami sudah berusaha maksimal untuk segera selesai dan bisa cepat dibahas," tuturnya. •

PANGGIL OPD, PASTIKAN REALISASI KEGIATAN 2022



Sejak pekan lalu, aktifitas anggota DPRD Sumenep terlihat cukup sibuk dibandingkan sebelumnya. Pasanya, para anggota legislator itu sedang melakukan pembahasan maraton terkait ran-

cangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2022 yang sudah lama dimulai. Mereka sibuk memblejeti laporan tersebut, dan kesesuaian dengan fakta di lapangan.

Kesibukan itu ternyata tidak hanya sebatas tertuju kepada para wakil rakyat, melainkan para eksekutif. Sebab, para instansi juga dibuat repot dengan dipanggil ke gedung dewan sesuai dengan konterpatnya. Mereka para pimpinan

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan stafnya diminta klarifikasi atas kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 lalu. Itu dilakukan secara bergiliran oleh masing-masing komisi.

Yang menjadi fokus para Anggota dewan dari setiap komisi adalah memblejeti pelaksanaan kegiatan termasuk kesesuaian realisasi anggaran dengan yang terjadi di lapangan. Hal yang dianggap penting untuk mendapatkan data yang utuh dan sempurna, sehingga dibutuhkan klarifikasi kepada instansi terkait. Bahkan, jika masih ada keraguan, mereka masih menyempatkan turun ke lapangan.

Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan sekretariat DPRD Sumenep Hasan Bashri menjelaskan, pembahasan di komisi itu dilaksanakan hingga tanggal 22 Juni mendatang. "Sekitar satu minggu pembahasannya, dan di bahas sesuai dengan konterpat masing-masing dengan OPD terkait. Laporan itu diperdalam oleh masing-masing anggota komisi," katanya.

Dia menuturkan, waktu yang diberikan terbilang cukup panjang, lantaran harus meminta klarifikasi kepada masing-masing OPD. Sebab, kadangkala tidak cukup hanya satu hari, melainkan membutuhkan pendalaman hingga lebih dari satu hari. "Tapi, setidaknya dengan waktu yang sudah diberikan diharapkan mampu memberikan ruang yang cukup untuk mengklarifikasi pertanggungjawaban kepada instansi terkait," ujarnya.

Setelah itu, sambung dia, hasil dari bahasan tersebut akan dilaporkan dalam sidang paripurna

oleh badan anggaran (Banggar) DPRD. Baru setelah itu akan dikirim ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi terhadap raperda pertanggungjawaban tersebut. "Nanti akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur, jika memang ada evaluasi akan dilakukan perbaikan oleh tim dan BPKAD Sumenep," ungkapnya.

Hasan mengungkapkan, apabila sudah tuntas, maka bisa sudah melakukan pembahasan perubahan APBD atau PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). "Salah satunya KUA PPAS untuk APBD Perubahan," tuturnya.

Pihaknya berharap pembahasan raperda pertanggungjawaban atas APBD itu bisa dituntaskan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh badan musyawarah (bamus). "Semoga tepat waktu," tuturnya. •

“

Sekitar satu minggu pembahasannya, dan di bahas sesuai dengan konterpat masing-masing dengan OPD terkait. Laporan itu diperdalam oleh masing-masing anggota komisi."



HASAN BASHRI

KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNGKAP KESULITAN KIOS TEBUS PUPUK BERSUBSIDI



Anggota komisi II DPRD Sumenep H Zainal Arifin mengungkap kesulitan sejumlah kios di kecamatan Ambunten untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi ke distributor. Otomatis, ketersediaan pupuk di “pengecer” menjadi langka, pada

gilirannya petani akan menjadi korban lantaran kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Padahal, pupuk tersebut dianggap sangat dibutuhkan untuk tanamannya.

Versi anggota politisi PDI Perjuangan itu, kios yang hendak melakukan penebusan pupuk dipersulit. Di mana masih harus

mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Namun, setelah dapat masih di persulit lagi dengan dalih lainnya. Hal itu menjadi keluhan dari sejumlah kios yang disampaikan kepada dirinya. Jadi, kesulitan pupuk petani salah satunya diakibatkan karena kesulitan mekanisme penebusan ke

distributor.

"Kami mendapatkan laporan dari banyak kios yang kesulitan melakukan penebusan pupuk, utamanya di Kecamatan Ambunten. Kenyataan ini sudah sangat meresahkan kios arena berdampak kepada kesulitan pupuk kepada petani. Kenyataan ini tentu sangat kami sesali," katanya.

Dia menuturkan, akibat dari rumitnya penebusan ke pihak distributor kebutuhan pupuk petani terpenuhi. Sehingga, sulit untuk melakukan pemupukan pertaniannya. "Padahal, kan sekarang sudah masuk MT (Masa tanam) 2, harusnya sudah disalurkan. Kebijakan dari distributor itu memicu terjadinya kelangkaan. Dan, langkah yang diambil juga sangat tidak etis," ungkapnya.

Politisi moncong putih itu

“

"Padahal, kan sekarang sudah masuk MT (Masa tanam) 2, harusnya sudah disalurkan. Kebijakan dari distributor itu memicu terjadinya kelangkaan. Dan, langkah yang diambil juga sangat tidak etis,"

menegaskan, idealnya penyaluran pupuk itu tidak ribet. Sebab, masing-masing kios sudah memiliki alokasi dan diperkuat dengan adanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). "Acuan penebusannya kan itu

saja sudah cukup. Jika alokasinya masih ada kan tinggal disalurkan. Yang penting laporan penyaluran kios jelas. Jangan membuat ribet masyarakat," tuturnya.

Zainal menuturkan, pihaknya meminta distributor yang melayani penyaluran pupuk ke kios untuk tidak mempersulit dengan dalih apapun. "Ini subsidi, hak rakyat. Jadi, harus sampai kepada petani lewat kios. Jangan membuat aturan sendiri," tegasnya dengan nada serius.

Untuk itu, pihaknya meminta instansi terkait untuk mendesak distributor menyalurkan pupuknya. Dan, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaiannya maka perlu melakukan tindakan tegas. Sebab, pihaknya tidak mau masyarakat menjadi korban, hanya dengan ulah dari distributor saja. "Distributornya CV Makmur Sejahtera yang Ambunten, maka perlu ada langkah dan tindakan dari dinas terkait agar petani bisa menikmati pupuk di masa tanam ini," tukas politisi dengan penampilan berewok itu. •



H. ZAINAL ARIFIN
ANGGOTA KOMISI II

DESAK PERBAIKAN JALAN TAMIDUNG-GAPURA TENGAH

Kondisi jalan rusak parah yang menghubungkan Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang menuju Desa Gapura Tengah mendapatkan perhatian anggota komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri. Politisi PKB itu meminta untuk segera menjadi atensi pemerintah kabupaten (Pemkab) guna dilakukan perbaikan. Sebab, sudah menjadi keluhan masyarakat di setiap dirinya turun ke lapangan.

Bayangkan, jalan tersebut sudah mengalami rusak parah dalam kurun waktu sekitar 11 tahun. Bahkan, sudah sering disampaikan kepada eksekutif, namun ternyata tidak diindahkan, bahkan terkesan diabaikan. Sehingga, jalan tersebut tetap dibiarkan rusak hingga parah, karena tidak pernah disentuh perbaikan sama sekali. Sementara kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan.

Protes perbaikan jalan rusak sebenarnya tidak hanya disampaikan anggota dewan, melaink-



M. MUHRI
ANGGOTA KOMISI III

an juga dari masyarakat. Bahkan, masyarakat juga sudah melakukan aksi untuk proses perbaikan jalan tersebut. Sebab, persoalan jalan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, sehingga, ketika ada kerusakan maka menjadi wajar untuk dikomplain dan diprotes. Masyarakat cukup sederhana, mereka hanya membutuhkan perbaikan.

“Kondisi jalan yang menghubungkan desa Tamidung dengan Gapura Tengah sangat memprihatinkan. Bahkan, sudah rusak parah, susah dilalui oleh masyarakat, ternyata sampai detik ini tidak dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Kenyataan ini tentu saja sangat menyesakkan dada, karena terkesan dibiarkan oleh pemerintah,” kata M. Muhri.

Untuk itu, politisi dari partai besutan KH. Abdurrahman Wahid itu meminta segera dilakukan perbaikan agar lalu lintas masyarakat lancar. Otomatis,



“

Saya harapkan bisa segera dianggarkan untuk kelancaran aktivitas kaum pelajar, pemuda, dan masyarakat setempat.”

akan berdampak pada mobilitas ekonomi masyarakat juga semakin meningkat. Apalagi, keberadaan jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan ini harus dilakukan percepatan perbaikan jalan tersebut. “Kami mendesak untuk segera diperbaiki,” ujarnya.

Bayangkan, sambung dia, sudah belasan tahun belum ada perbaikan dari Dinas PUPR Sumenep. “Saya harapkan bisa segera dianggarkan untuk kelancaran aktivitas kaum pelajar, pemuda, dan masyarakat setempat,” ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya mendesak untuk dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2023. Ya kalau tidak

bisa, nanti harus bisa full di APBD Murni 2024.

“Karena ini menyangkut jalan umum, disitu menjadi akses pendidikan, diantaranya lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan,” katanya kembali menegaskan.

Kepala Bidang (Kabid) Dinas PUPR Sumenep, Agus Adi Hidayat menyampaikan bahwa Penanganan sementara sudah dikerjakan, dan yang paham proses APBD pasti mengerti. “Setiap pelaksanaan pekerjaan wajib dianggarkan di APBD, sehingga jika di APBD belum dianggarkan, maka harus dianggarkan dahulu apalagi kebutuhan anggarannya cukup besar,” tuturnya. •

DINILAI STAGNAN, DEWAN SOROTI PAD SUMENEP

Sejumlah fraksi DPRD Sumenep menyoroti belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2022 lalu. Bahkan,



MAS'UD ALI
ANGGOTA KOMISI III

pendapatan di tahun lalu terbilang masih stagnan karena tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan di tahun 2021 lalu. Sehingga, para legislator mengklaim jika pendapatan tersebut terkesan jalan di tempat, dan tidak dijadikan target prioritas oleh masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Hal itu disampaikan dalam rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas pertanggungjawaban bupati, Senin (12/6/2023). Anggota fraksi secara bergantian memaparkan pandangannya. Masalah PAD sudah berulang kali menjadi sorot sejumlah anggota dewan karena Pemkab dinilai tidak serius dalam mengawal perkembangan kenaikan PAD di setiap tahunnya.

Selain PAD, mereka menyampaikan beberapa indikator capaian pemerintah belum memenuhi target dan belum menyentuh

kepada kepentingan masyarakat. sehingga, perlu dilakukan kerja nyata dan kerja keras untuk mencapainya. Sehingga, kinerja yang ditunjukkan pemerintah hendaknya tidak hanya sekadar formalitas belaka yang hanya memenuhi kewajiban saja.

"Pemkab harus mampu menggali sumber daya alam (SDA) yang ada. Apalagi, Kabupaten Sumenep bisa dibilang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, sehingga bisa dijadikan target untuk meningkatkan pendapatan, jangan hanya sekadar bekerja formalitas di belakang meja saja," kata Mas'ud Ali, Fraksi PPP saat menyampaikan pandangan umum.

Sebab, pihaknya meyakini masih banyak sektor pendapatan yang belum digarap maksimal. Sebab, pihaknya menduga pemerintah hanya menggarap yang tampak dipermukaan dan sudah

mejadi rutinitas setiap tahunnya. Padahal, bupati sudah sering mengingatkan untuk kerja inovatif, dengan terobosan yang baru. "Jadi, harus ada inovasi-inovasi agar pendapatan menjadi lebih banyak," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Sumenep mampu menerapkan tata kelola daerah yg baik dengan memberikan pelayanan publik yang maksimal. "serta kegiatan yang lebih menyentuh kepada kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Sehingga, hal lain yang perlu juga disampaikan dengan semakin meningkatnya kuantitas jalan darat dan kepulauan jalan

penghubung antar desa.

Menurut anggota komisi III itu, , tidak hanya sektor infrastruktur, namun juga terkait indikator angka kemiskinan mencapai 26 ribu dari pertumbuhan ekonomi sebanyak 3,62 persen, sehingga angka tersebut setara 18 persen sejak 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. 'Apa yang menjadi kendala,'" bertanya.

Versi Fraksi PDI Perjuangan yang mengutarakan hal yang sama terkait pembangunan infrastruktur di darat dan kepulauan. Tidak hanya itu pihaknya juga mengeluhkan pelayanan kesehatan yang belum maksimal serta perlunya kegiatan untuk menunjang ekonomi masyarakat. •

“

Pemkab harus mampu menggali sumber daya alam (SDA) yang ada. Apalagi, Kabupaten Sumenep bisa dibilang memiliki kekayaan yang sangat melimpah."



GANTIKAN AGUS, IMRAN DILANTIK JADI ANGGOTA DEWAN



Moh. Imran dilantik sebagai anggota DPRD Sumenep Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk sisa jabatan 2019-2024, dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Senin (5/6/2023). Dia

menggantikan Agus Rahman Budiharto yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Pelantikan dan pengukuhan anggota legislator baru tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Abdul Hamid Ali Munir

Moh. Imron dilantik sebagai

anggota dewan lantaran memperoleh suara terbanyak kedua setelah Agus Rahman Budiharto di daerah pemilihan (dapil) IV, yang meliputi Kecamatan Rubaru, Ambunten, Dasuk dan Pasongsongan. Sehingga, dengan suara tersebut dia melenggang sebagai

wakil rakyat. Sosok Imron bukan orang baru, sebab di periode sebelumnya sudah sempat menjabat sebagai anggota dewan

Hadir pada kesempatan itu bupati Achmad Fauzi, Sekdakab Edy Rasiyadi, Wakil Ketua dan sejumlah anggota dewan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tampak hadir pada kesempatan itu. Camat, Komisioner KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menghadiri kegiatan tersebut.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan (SK) Gubernur oleh sekretaris DPRD Fajar Rahman.

Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan dan pengucapan sumpah yang dipimpin Ketua DPRD H. Abdul Hamid. Pelantikan berlangsung dengan penuh khidmat.

"Alhamdulillah, hari ini sudah selesai pelantikan anggota dewan PAW. Maka, Moh. Imran sudah resmi sebagai anggota dewan dan bisa bergabung dengan yang lain," kata Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir.

Politisi PKB itu mengucapkan selamat kepada anggota dewan yang baru dilantik tersebut. Pihaknya berharap dengan pelantikan diharapkan mampu memberikan warna untuk kerja kedewanan, sehingga mampu memberikan pengaruh kepada kebijakan publik yang akan diambil oleh anggota dewan.

"Selamat dan semoga amanah. Setelah dilantik bisa langsung bekerja, berbaur dengan yang lain menjalankan tugas

“

Selamat dan semoga amanah. Setelah dilantik bisa langsung bekerja, berbaur dengan yang lain menjalankan tugas sebagai anggota legislator. Keberadaan beliau semoga mampu memberikan warna baik bagi anggota dewan," harapnya.

sebagai anggota legislator. Keberadaan beliau semoga mampu memberikan warna baik bagi anggota dewan," harapnya.

Wakil Ketua DPRD Faisal Muhlis menjelaskan, anggota dewan yang baru dilantik langsung menempati alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditinggalkan Agus Rahman Budiharto. Dia akan menempati komisi III dan Badan Musyawarah (Bamus). "Otomatis, AKD yang ditempati sesuai dengan yang ditinggal mas Agus (Agus Rahman Budiharto, Red)," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, dengan sisa waktu yang ada hingga tahun 2024, diharapkan anggota dewan yang baru mampu menjalankan tugas dan fungsi kedewan dengan baik dan maksimal. Setidaknya bisa sama dengan Agus atau bahkan bisa melebihi kinerjanya. "Karena bukan orang baru, jadi saya yakin bisa langsung bekerja maksimal nantinya," ungkapnya. •



ABDUL HAMID ALI MUNIR
KETUA DPRD SUMENEP

DESAK PEMENUHAN FASILITAS DESTINASI WISATA

Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Sumenep, utamanya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) masih terbelang jauh dari harapan. Sebab, pemenuhan fasilitas penunjang masih minim. Sehingga, daya tarik untuk datang ke kabupaten ujung timur Pulau Madura menjadi kecil, lantaran “service” yang akan diberikan tidak maksimal, dengan minimnya menu yang diberikan kepada pengunjung yang datang.

Bahkan, banyak sejumlah destinasi wisata yang masih dibiarkan tanpa ada pemenuhan fasilitas memadai. Misalnya, di pantai Lombang, jalan untuk masuk saja masih rusak. Padahal, infrastruktur menjadi hal yang utama untuk diperhatikan dalam pengelolaan destinasi wisata. Belum lagi, fasilitas yang ada di lokasi wisata juga dianggap be-

lum memadai, bahkan terkesan stagnan, tidak ada perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya.



SAMI'OEDDIN
ANGGOTA KOMISI IV

ya.

Otomatis, banyak pengunjung yang datang ke kota keris tidak menikmati destinasi wisata yang ada, mereka memilih hanya sekadar jalan-jalan menikmati wisata religi ke sejumlah asta yang ada di Kota Sumekar itu. Dan, ada juga yang datang sambil menikmati wisata yang dikelola oleh pihak swasta, alasannya fasilitas yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan yang dikelola oleh Pemkab.

“Pengelolaan destinasi wisata yang dikelola oleh Pemkab memang sangat memprihatinkan. Sebab, fasilitas yang dimiliki tidak begitu memadai. Di mana membuat pengunjung yang datang menjadi tidak tertarik. Sebab, hanya hendak melihat pantai saja tanpa ada fasilitas penunjang lainnya,” kata anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami'oeddin.

Dia menuturkan, misalnya

“

Apabila memang mau memperkenalkan destinasi wisatanya, maka jangan ragu untuk berbenah. Kalau pun tidak ada dalam APBD, kan pengelolaan bisa dilakukan dengan menggandengan investor.”

pantai yang ada di Sumenep dan dikelola pemkab harus terus berbenah dengan wahana permainan yang menjadi daya tarik kepada pengunjung. Selain itu, fasilitas penginapan dari destinasi wisata cukup jauh, di mana harus kembali ke kota untuk menginap. “Hal tersebut tentu saja menjadi tidak efisien dalam kunjungan wisata. Dan, ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tuturnya.

Politisi PKB itu mengungkapkan, pihaknya menuding pemkab terkesan kurang serius dalam mengelola destinasi wisata di Kabupaten Sumenep. Sebab, bertahun-tahun tetap saja tidak ada perkembangan yang signifikan. “Apabila memang mau memperkenalkan destinasi wisatanya,

maka jangan ragu untuk berbenah. Kalau pun tidak ada dalam APBD, kan pengelolaan bisa dilakukan dengan menggandengan investor,” ucapnya.

Menurutnya, pihaknya melihat sejumlah event digelar oleh pemkab Sumenep, dengan harapan bisa meningkatkan kunjungan wisata.

Sehausnya, setelah pelaksanaan event maka pengunjung bisa dituntun untuk mengunjungi sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten dengan logo kuda terbang itu.

“Sebelum event digelar seharusnya sudah ada destinasi wisata yang siap menampung para pengunjung dengan fasilitas yang cukup baik,” paparnya. •



DESAK PENERTIBAN TAMBAK UDANG ILEGAL



Kabupaten Sumenep tampaknya menjadi surga bagi pengusaha tambak udang. Buktinya, dalam waktu beberapa terakhir ini tambak udang tumbuh subur di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura. Tambak udang yang ada, sebagian dikelola oleh petambak lokal dan tidak jarang juga oleh investor atau pengusaha yang datang dari luar Sumenep. Tampaknya, keberadaannya

sudah cukup banyak di sejumlah pesisir pantai utara (Pantura), hingga ke wilayah perbatasan, di Kecamatan Pasongsongan.

Tambak udang ini sudah mulai berkembang, misalnya, di Kecamatan Gapura, Batang-Batang, Dungkek, Talango, Batu Putih, Pragaan, Kecamatan Bluto, Dasuk dan Kecamatan Pasongsongan serta sejumlah wilayah lainnya. Bahkan, keberadaannya sudah banyak meresahkan war-

ga. Keberadaannya juga sempat di protes oleh warga. Alasannya, karena masyarakat tak mau lahan “dibajak” oleh para pemilik modal.

Selain itu, keberadaan tambak udang itu dinilai akan merusak dan mencemarkan lingkungan. Dan, banyak hal lain yang menjadi pertimbangan protes atas keberadaan tambak udang ini, utamanya di wilayah Gapura hingga Batu Putih. Memang, ada

juga sebagian yang menyetujui keberadaan tambak tersebut.

Perlu diketahui, tidak semua tambak yang ada di Sumenep ini mengantongi izin dari pemerintah. Hanya ada beberapa tambak yang berizin, sementara lebih banyak juga yang ilegal. Bahkan, hingga saat ini masih ada saja penambak yang tidak mengurus izinnya, padahal sudah melakukan aktifitas.

Meski demikian, ternyata tidak ada tindakan apapun dari pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah (perda). Sehingga, para petambak tetap merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya.

Anggota komisi III DPRD Wiwid Harjo Yudanto, meminta pemkab tidak berpangku tangan menangani keberadaan tambak ilegal itu. Seharusnya, tambak yang tidak berizin itu sudah bisa ditindak tegas. "Jika sudah tidak berizin, sudah sepatutnya tidak dibiarkan melainkan ditertibkan. Ini pihak perizinan harus bergerak dan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Sebab, itu sudah bagian dari pelanggaran terhadap aturan," katanya.

Menurut Wiwid, sesuai dengan amatannya cukup banyak yang belum berizin. Maka, sudah seyogyanya tidak dibiarkan begitu saja, melainkan harus ditertibkan. "Pemerintah itu, tidak hanya mengantongi data yang mengajukan izin, yang tidak mengantongi izin juga harus dikantongi. Sehingga, dengan mudah akan melakukan penertiban atas tambak yang ti-

“

Pihak perizinan harus bergerak dan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Sebab, itu sudah bagian dari pelanggaran terhadap aturan."

dak berizin. Sebab, dikhawatirkan mengganggu masyarakat dan limbahnya tidak dikelola dengan baik," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pengawasan atas yang berizin itu dilakukan secara intensif. Hal itu untuk menghindari adanya penyimpangan atas izin yang dikeluarkan. Sebab, pi-

haknya sudah mendengar jika ada tambak yang izin, sudah menyalahi aturan. Yakni, mereka menggarap tambak di bawah 100 meter dari bibir pantai. "Jadi, disini kan jelas ada pelanggaran, di mana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, diperlukan langkah taktis dan penertiban," tuturnya. •



WIWID HARJO YUDANTO
ANGGOTA KOMISI III

Anda Suka Menyelam? Datang ke Pulau Sapeken

Kekayaan wisata bahari di Sume-
nep Madura memang tidak perlu
diragukan lagi. Sebab, banyak
panorama pantai yang bisa
dinikmati para pengunjung yang
datang, baik dari dalam Kota Sumekar,
maupun wisatawan dari luar daerah.
Pantai Gili Labak, Gili Iyang, Lombang
dan Slopeng sudah maffhum di telinga
wisatawan yang hendak ke Kabupaten
ujung timur Pulau Madura ini. Sebab,
destinasi wisata ini sudah lama ada, dan
banyak dikenal lantaran sangat populer.

Apalagi, Kabupaten dengan logo
kuda terbang ini memang memiliki
banyak pulau, dengan jumlah penduduk
yang tidak sedikit. Pulau-pulau yang
ada ini memang masih terlihat sangat
perawan dan bisa dinikmati oleh para
wisatawan. Keasrian ekosistem laut masih
juga terjaga, karena bagi warga kepu-
lauan menjaga keasrian pantai menjadi
keharusan dan merupakan amanah dari
leluhur. Apalagi, banyak kebutuhan hidup
diperoleh dari lautan yang ada, karena
banyak berprofesi sebagai nelayan.

Terbaru, yang bisa dijadikan juju-
gan untuk melakukan perjalanan wisata
bahari adalah pantai Pulau Sapeken. Di
mana pulau ini masih terlihat sangat asri
dan sejuk di lihat mata. Secara geografis,
kepulauan Sapeken masih masuk wilayah



EKSPLOR WISATA



teritorial Kabupaten Sumenep. Ia merupakan salah satu kecamatan dari 27 kecamatan yang dimiliki Kota Sumekar. Jaraknya memang cukup jauh dari daratan Sumenep, membutuhkan perjalanan sekitar 18 jam menggunakan kapal feri. Lokasinya, terletak di ujung sebelah timur Kepulauan Madura.

Meski jarak jauh, datang ke pulau Sapeken tidak akan membuat anda lelah. Saat turun dari kapal akan disuguhkan pemandangan pantai yang

cukup menawan. Pulau ini memang menjadi daya tarik luar biasa. Di mana pulau ini memiliki luas terumbu karang yang sangat menarik. Hampir 50 persen dari total luasan terumbu karang di Kepulauan Madura dan Kangean berada di areal pulau Sapeken. Keberadaan luas terumbu karang yang masih bagus ini menambah eksotis pulau ini.

Jadi, tidak akan rugi bagi pecinta snorkeling untuk melakukan penyelaman di tempat ini. Ini bisa menjadi spot pilihan yang harus dilalui para pencinta bahari. Otomatis, sambil melakukan penyelaman dan melihat keberadaan terumbu karang yang eksotis. Jadi, sangat rugi jika tidak menyempatkan berlayar ke lokasi ini. Ini salah satu destinasi wisata yang bisa ditawarkan oleh Sumenep kepada wisatawan.

Untuk datang ke lokasi ini tidak terlalu sulit, sebab para pengunjung atau wisatawan dari arah kota Sumenep langsung menuju pelabuhan Kalianget. Di Pelabuhan ini sudah parkir kapal feri yang akan mengantarkan ke lokasi wisata dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 18 jam. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menggunakan kapal cepat atau ekspres, dengan perjalanan sekitar 4 jam. Di tengah perjalanan menuju destinasi wisata, anda juga bisa menikmati pemandangan pantai yang luas dan cukup menarik. •



MASA JEPANG, SUMENEP HANYA PUNYA PENDIDIKAN SR



Di awal-awal kedatangannya, sebagaimana di daerah lain di Indonesia, pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan dalam bidang sosial, pendidikan bahkan dalam bidang pemerintahan. Di bidang pendidikan misalnya, banyak sekali yang diubah, semisal pelarangan buku-buku berbahasa Belanda dan lain-lain. Pada awal kedatangannya ke Indonesia, pemerintah militer Jepang membekukan semua kegiatan pendidikan yang dianggap sangat rumit yang diadakan pada masa kolonial Belanda. Usaha tersebut sekaligus mengikis pengaruh belanda di Indonesia.

Pada tahun 1942 jepang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap buku-buku berbahasa Belanda. Semua itu bermaksud untuk meng-

hilangkan pengaruh barat dan meninggikan derajat bangsa Asia dibawah kekuasaan dan pimpinan jepang. Sistem pendidikan yang pada masa kolonial dibagi atas dasar ras dan golongan, pada masa penjajahan jepang dihapus, masyarakat mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Tujuan utamanya bukan hanya menghilangkan doktrinisasi pendidikan ala barat yang pernah dijalankan oleh pemerintah Kolonial selama berpuluh-puluh tahun, namun tujuan utama pemerintah jepang adalah memenangkan peperangan. Maksudnya dengan mendidik masyarakat Indonesia, mereka bisa memanfaatkannya untuk kepentingan tenaga kerja Jepang bukan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia.

Di masa akhir pendudukannya , dengan

TEMPO DOELOE

landasan semangat “Hakko Icchiu”, yang menjadi landasan pokok utama pendidikan pada masa itu, mereka mengajak masyarakat Indonesia untuk bekerjasama “memakmurkan Asia Raya”. Setiap hari para murid-murid di sekolah dari semua tingkatan diangkat sumpah setianya untuk kaisar Jepang. Pada masa pendudukan Jepang terdapat tiga prinsip pokok kebijaksanaan dibidang pendidikan yaitu :Pendidikan ditata kembali atas dasar penyeragaman dan kesesamaan untuk seluruh kelompok etnis dan kelas social.Secara sistematis pengaruh pendidikan Belanda dihapus dari sekolah-sekolah, sedangkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia dijadikan landasan utama.Semua lembaga pendidikan dijadikan alat untuk memasukan doktrin gagasan kemakmuran bersama Asia Tenggara dibawah pimpinan Jepang.

Perubahan istilah dan nama jenjang sekolah pada jaman Pendudukan Jepang, sebagai berikut :Jenjang sekolah dasar menggunakan istilah Sekolah Rakyat (SR) atau Kokumin Gakko Jenjang sekolah menengah pertama (SMP) atau Shotchu Gakko. Jenjang sekolah menengah tinggi (SMT) atau Koto

Chu Gakko. Jenjang perguruan tinggi. Perguruan tinggi tersebut adalah :

- Sekolah tinggi kedokteran (Ika Dai Gakko) di Jakarta.
- Sekolah teknik tinggi (Kogyo Dai Gakko) di Bandung
- Sekolah tinggi Pamong Praja (Kenkoku Gakuin)
- Sekolah tinggi Kedokteran Hewan di Bogor.

Di sumenep, tidak semua jenjang-jenjang pendidikan itu ada. Di Sumenep hanya ada sekolah SR atau Kokumin Gakko dan Sekolah pelayaran. Sekolah SR (Kokumin Gakko) lokasinya ada di Pangligur yang sekarang ditempati oleh SMPN 1 Sumenep dan di Pajagalan, sekarang SDN Pajagalan 1 serta Sekolah pelayaran “Madura Seining Yosesyono Seito”. Saat ini gedung dipakai kantor dinas Pengairan Kab. Sumenep dengan direktur sekolahnya bernama Yanakita. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut diperkuat oleh pernyataan Maknoen dalam makalah sehari yang disusun oleh sulaiman sebuah makalah pokok saresahan sehari tahun 1994. •



SECOND WIND

Oleh:
BUDIMAN HAKIM
Founder TheWriters.id



Aduh gue capek, Bud. Istirahat, yuk?" keluh Muji dengan suara ngos-ngosan.
"Capek itu cuma ada di pikiran. Kalo lo mulai merasa capek berarti, secara fisik, lo masih bisa jalan 10 Km lagi," sahut saya membesarkan hatinya.

"Rumus darimana, tuh, Bud? Ngarang lo, ah!"

"Yeee, waktu muda, kan, gue pecinta alam."

Sebelumnya Muji Emang jarang berolahraga. Tapi begitu kena sakit pinggang, dokter menyuruhnya jalan pagi, setiap hari, minimal 30 menit. Biar ada temen,

dia ngajak saya jalan bareng dia. Saya langsung setuju. Jadilah di minggu pagi itu kami berdua berjalan kaki menyusuri jalan setapak dari kampung ke kampung di lingkungan rumah.

"Emang lo gak capek, Bud?" tanya Muji lagi.

"Gue capek sebenarnya tapi tadi udah dapet second wind."

"Second wind? Apaan, tuh?"

"Seperti gue bilang tadi, kalau kita mulai capek sebenarnya itu cuma ada di pikiran. Begitu kita paksain jalan, tau-tau capek kita ilang. Kita seger lagi. Kita kuat

ARTIKEL

lagi. Orang-orang pecinta alam biasanya bilang 'second wind'".

"Oh begitu. Baiklah kita jalan lagi."

Jalan pagi di jalan-jalan kampung buat saya menyenangkan. Ada banyak jajanan yang bisa kita lahap sehabis olah raga. Ada kupat sayur, nasi pecel, bubur ayam dan banyak lagi.

"Eh, omongan lo menjadi kenyataan, Bud. Gue gak begitu capek lagi. Gue dapet second wind," teriak Muji dengan suara gembira.

"Alhamdulillah. Keren lo, Ji."

Seakan ingin membuktikan omongannya, Muji berlari dengan cepat meninggalkan saya jauh di belakang. Saya tetap berjalan dan membiarkan dia pergi.

Sesampainya di pengkolan jalan, saya liat Muji sedang berhenti posisi menunduk seperti posisi ruku. Napasnya memburu. Mukanya pucat karena letih teramat sangat.

"Capek banget gue, Bud. Mau mati rasanya," katanya dengan suara tersengal-sengal.

"Elo juga ngapain lari. Kalo mau kuat, kita harus berjalan secara konstan. Tidak melambat dan tidak mempercepat. Napas lo harus sinergi dengan langkah lo. Gue jamin lo gak cepet-capek," sahut saya sambil berjalan meninggalkan dirinya.

"Woy, tungguin, Bud! Woy, kita istirahat dulu, yuk?" teriaknyanya.

Saya tidak peduli dan terus melangkah. Muji pun terpaksa mengikuti dan berjalan di sebelah saya. Langkah demi langkah, pengkolan demi pengkolan, sapaan basa-basi pada penduduk setempat kami lalui.

"Weits, keren! Gue dapet second wind yang kedua, Bud!" teriak Muji.

"Heh? Second wind yang kedua? Maksud lo???" tanya saya kebingungan.

"Tadi kan gue capek terus dapet second wind, ilang capek gue. Nah, gara-gara lari tadi, gue capek lagi. Sekarang capeknya ilang lagi, berarti gue dapet second wind yang kedua, kan?"

"Hahahahahaha....." Tawa saya sekonyong-konyong menginterupsi langkah kami. Tawa spontan yang begitu lantang sehingga penduduk kampung pada mengok ke arah kami.

"Kok lo ketawa, Bud? Apa yang lucu?"

"Emang second wind artinya apa?"

"Kalo gue analisa dari konteksnya, 'second wind' artinya 'tenaga baru' kan?" kata Muji.

"Hahahahaha...iya, deh. Yuk, kita jalan lagi," kata saya sambil melangkahhkan kaki kembali.

Gak lama kemudian kami sampai di sebuah warung. Di sana Muji menyantap pecel pincuk dan saya memangsa kupat sayur dengan ganas. Setelah kenyang, merokok dan ngobrol-ngobrol sejenak, Muji mengajak jalan lagi.

"Semangat amat lo, Ji? Makanan di perut juga belum turun," protes saya.

"Ayolah, Bud. Abis makan gue kayaknya dapet second wind yang ketiga, nih..." katanya.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHA...." •



POHON MANGGA TUA DI DEPAN RUMAH

Oleh:

IVA PUTRI

Member TheWriters.id

Tadi sore saya baru pulang dari camping, langsung kaget banget ngeliat pohon mangga besar di tanah fasum di depan rumah saya sudah habis ditebang. Suami saya langsung menghampiri tukang yang sedang mengerja-



kan penebangan pohon tersebut. "Pak, koq pohonnya ditebang? Siapa yang suruh?"

Si bapak tukang menjawab, "Ini Pak, yg punya rumah ini yg suruh", sambil menunjuk rumah di depan rumah saya.

"Apa sudah koordinasi dengan Pak RT?" Tanya suami saya lagi.

"Wah, sy ga tau, Pak. Saya cuma terima perintah untuk tebang dari yg punya rumah ini," kata si bapak tukang sambil sekali lagi menunjuk rumah di depan rumah saya.

"Percuma deh, ga usah tanya ke mereka. Nanti sy tanya sama Ibu RT aja," kata saya sambil menarik suami saya masuk.

Dan saya pun langsung WA ke Ibu RT, Pak Widodo Satpam & ke dua orang tetangga saya, Ibu Dini & Ibu Paulina. Jawaban yg paling cepat sy dapat dari Pak Widodo. Menurut Pak Widodo memang ada ajuan dari warga E5/1 untuk menebang pohon tersebut. Menurutn-ya karena pohon mangga itu sudah tua & rawan roboh. Jadi sudah koordinasi dengan salah seorang pengurus RT, Pak Candra dan sudah diizinkan. Dengan syarat diganti dengan tanaman baru. Dan untuk biaya penebangan ditanggung warga E5/1.

Dari Ibu Paulina sy dapat info, ternyata pohon besar yg ditebang itu ga cuma satu tapi ada dua. Terus terang sy sangat menyesali ini. Pohon itu sudah ada di sana sangat lama. Sudah jadi peneduh & penyumbang oksigen

ARTIKEL

untuk saya & keluarga & tentunya utk tetangga2 di sekitar rumah saya. Dan selalu jadi penghibur di saat musim mangga tiba. Saya sering lihat banyak mbak2 & tukang yang bisa menikmati buah dari pohon tersebut, meskipun cuma harus memungut dari yang jatuh ke tanah.

Pohon itu sudah ada di sana dari awal saya pindah ke Blok E2, jadi umurnya memang sudah lebih dari 20 tahun. Tapi apakah pohon itu rawan roboh? Kalau rekomendasi bahwa rawan roboh ini datang dari Dinas Pertamanan ato dinas LHK, saya akan sangat maklum. Tapi apakah memang sudah ada rekomendasi dari Dinas terkait? Kayaknya sih ga.

Saya ingat pohon mangga di rumah kakek saya di Padang Panjang. Pohon itu sudah ada di sana sejak saya masih anak2. Pertama kali saya diajak berlibur ke sana, umur saya baru 8 tahun. Dan pohon mangga itu sudah berdiri kokoh di sana. Terakhir kali saya ke sana pada tahun 2018, pohon itu masih berdiri dengan kokoh di sana. Batangnya diselimuti pohon2 pakis & tanduk menjangan. Daunnya rimbun meneduhi halaman depan rumah. Dan pohon itu masih berbuah dengan rajin dan buahnya menjadi milik semua tetangga karena rumah pusako tersebut sekarang kosong.

Kalo sekarang umur saya sudah 52 tahun, artinya pohon itu juga sudah berumur hampir 50 tahun, atau mungkin juga sudah lebih tua dari saya.

Menurut informasi Dinas Lingkungan Hidup, Pohon mangga adalah tanaman berumur panjang, bahkan beberapa spesiesnya dapat berbuah hingga umur 300 tahun. Akarnya mampu tumbuh ke dalam tanah hingga mencapai kedalaman 6 meter dan akar cabang menyebar ke samping.

Miris sekali melihat batang pohon mangga yg kokoh di tanah fasum itu sudah termutilasi menjadi potongan2 kecil yang tergeletak di tanah. Di tengah issue buruknya kondisi udara sekarang, adanya pohon rimbun benar2 menjadi penolong & penyejuk. Tapi yang ada di hadapan saya adalah 2 pohon besar yang ditebang. Dengan alasan peremajaan, memang akan ada pohon pengganti nantinya. Menurut bapak tukang yang menggali tanah, konon kabarnya akan ada 3 pohon duren yang akan ditanam di sana, yang juga difasilitasi oleh pemilik rumah E5/1. Entah berapa tahun lagi kita harus menunggu untuk bisa menikmati rimbunnya pohon2 duren itu. Klo untuk makan buahnya, besok juga bisa beli di TOP toko buah segar. •



MUNGKIN INI YANG NAMANYA JENUH

Oleh:
DINA PASARIBU
Member TheWriters.id

Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata" te-tiba telinga ini menangkap sebaris lirik yang terucap dari sebuah lagu yang diputar dari ruang central control. Lagi riweuh begini kok bisa-bisanya telinga ini. Auk ah.

Hari ini cukup padat. Dapat tugas on duty sejak pagi. Kerjaan utama belum selesai semua. Tim yang datang cuma aku dan satu anggota. Satu lagi sedang libur. OFF day. I love OFF day. Hahahahaha

Anyway, namaku Dea. Tahun ini menandai enam tahun perjalanan karirku di bidang perbankan. Well, hampir enam tahun. Sejak masuk aku ditempatkan di bagian supporting. Back office mereka menyebutnya. Sempat melakoni tugas di divisi lain hampir setahun tapi ujungnya ya balik lagi ke supporting. Aku merasa tidak terlalu kompeten di divisi yang lain.

Hari ini aku sengaja izin pulang lebih awal. Hmm sebenarnya sudah memenuhi jam kerja sih tapi entah kenapa kok jadi aku harus lapor dulu untuk ngambil

hakku sendiri. Sebel. Aku izin karena ada perlu. Begitu alasanku ke atasan. Aku bukannya bohong. Badan ini berasa kurang enak juga. Entah kenapa bawaannya pengen sendiri. Memikirkan hal yang indah-indah. Seindah dapat beasiswa master ke luar negeri. Ngarep. Keluar dari kantor, langit biru masih cukup terang. Ya Tuhan, indah sekali. Bukan aku berlebihan, tapi serius. Aku pas ngantor jarang menikmati pulang sore hari maka sore tadi sungguh istimewa. Batinku bersyukur.

Sepanjang perjalanan aku terus melihat ke lalu lintas sekeliling. Ruwet pikiran akan pekerjaan dan harapan berusaha merasuk kedamaianku sore ini tapi aku tetap fokus. Sesekali ojek online yang aku tumpangi berhenti. Macet. Biasa, jam pulang kantor, semua mau cepat sampai di rumah. Terbayang jurusan yang aku ambil waktu kuliah dulu. Andai aku ambil Sastra Inggris.. mungkin sekarang aku sudah jadi dosen. Teman sebayaku beberapa sudah jadi dosen, malah sudah ada yg doktor. Iri? Hmm tidak sih. Aku tidak gampang iri pada pencapaian seseorang, tapi kalo dibilang aku terpecut, pastinya yes. Aku merasa diriku cukup dekat dengan dunia pendidikan. Kedua orangtuaku pendidik. Salah seorang adikku juga. Entah kenapa dengan pekerjaanku sekarang kok aku malah lain sih? Agak lain memang..

Sesampai di rumah kubereskan semua perlengkapanku. Sejam kemudian aku sudah merebahkan diri di kamar. Tak lupa secangkir kopi campur krimer kuletakkan di meja. Rencananya aku mau mengecek beberapa lowongan kerja, siapa tahu nanti perhatianku berpaling pada drama Korea, aku sudah siap dengan minumannku. Hihhi..

Benar saja. Belum satu jam aku berselancar di dunia maya, cuplikan drakor sudah mengganggu perhatianku. Dalam hitungan menit mataku sudah melek dengan adegan keluarga kaya raya yang sedang menerima tamu seorang putri dari keluarga sederhana yang notabene calon istri pilihan sang putra kebanggaan.

Sejenak aku menguap. Sepertinya aku akan tahu jalannya cerita ini. Fokusku teralihkan lagi dengan kejadian siang tadi di kantor. Bisa-bisanya Pak Bos memintaku membuat laporan serumit itu mengandalkan komputer selow dalam waktu kurang dari satu jam. Mungkin dikiranya aku punya kekuatan super. Terngiang kata-kata Yanti, teman seangkatanku pada saat perekrutan. "Perusahaan nih, makin kesini kok makin kesana yak?" Benar juga pikirku.

Kami sudah hampir enam tahun di perusahaan ini tapi belum pernah merasakan yang namanya naik gaji apalagi bonus, seperti rekan lain yang lebih senior. Febi,

teman seangkatanku yang lain, menimpali. "Iyah. Bukannya apa-apa nih. Salah satu tolak ukur tumbuh dan berkembangnya suatu usaha ya dari cara perusahaan memberi gaji. Kalo gaji segitu aja dari tahun ke tahun ya berarti bisnis gak tambah besar dong. Kerjaan doang tambah buanyak." Aku dan Yanti hanya melongo saja mendengar opini Febi.

Sudah beberapa tahun ini kami memang merasa 'it's not our passion'. Selain karena ini jauh dari jurusan saat kami kuliah dulu, realita dunia perbankan ternyata 'gilak juga'. Maka jadilah kami trio yang bawaannya saling menyemangati satu dengan yang lain. Oh yah, aku lupa. Walaupun kami satu angkatan perekrutan tapi pekerjaan kami beda divisi dan beda kantor penugasan. Yanti divisi supporting juga tapi lebih ke bagian procurement (pengadaan barang). Febi bagian front office, kontak langsung dengan nasabah.

Beberapa kali sudah aku utarakan pada mereka sepertinya beban kerja ini mulai makin berat tapi yang lebih parah karena aku mulai merasa aku seharusnya ada di tempat lain, di bidang lain, di bidang yang kusukai dan dikuasai. Bukannya aku tidak bersyukur tapi peribahasa yang bilang 'cintailah pekerjaanmu maka pekerjaanmu akan mencintaimu' kayaknya tidak nampol deh ke aku. Begitu biasanya aku menggerutu. Hahahaha. Atau mungkin ini yang namanya jenuh?? (Bersambung). •





PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SUMENEP
MENGUCAPKAN SELAMAT



HARI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

10 JUNI 2023

VARIAN BARU BURGER

Oleh:
VIONA WG
Member TheWriters.id

Malam itu, saya dan suami tidak makan di rumah. Tidak ada perayaan. Kami hanya ingin memanfaatkan diskon dari salah satu restoran fast food pada hari itu. Kami memiliki menu andalan di restoran itu yang selalu dipesan. Menu burger yang memiliki dua lapis daging patty dilengkapi dengan keju dan sayur-sayuran. Ketika dalam perjalanan menuju restoran, kami sudah memutuskan ingin memesan itu.

Sesampainya di restoran, saya memesan melalui mesin layar sentuh. Saya sudah hafal di mana letak menu burger itu di mesin ini. Ketika ingin menambahkan pesanan ke dalam keranjang, saya melihat ada varian baru yang ditawarkan dari menu burger andalan kami.

Varian itu memiliki tambahan bacon sapi di dalam burgernya. Hari itu sedang promo. Varian tersebut memiliki harga yang sama dengan varian yang biasa saya beli. Hmmm.. Tambahan bacon, harga sama.

Saya pun beralih memesan menu itu, barangkali ini bisa menjadi varian favorit kami selanjutnya. Saya mengatur pesannya menjadi dua paket, dilengkapi dengan kentang goreng dan minuman bersoda.

Pesanan akan diantarkan ke meja jika sudah selesai dibuat. Setelah memesan, saya dan suami mencari tempat duduk. Hari itu cukup ramai dengan pengunjung, pasti karena ada diskon khusus di hari itu. Untungnya, masih ada tempat tersisa untuk kami. Sambil menunggu pesanan datang, saya dan suami ngobrol, bertukar cerita di hari itu.

Hampir 10 menit berlalu, pramusaji mengantarkan pesanan kami. Obrolan kami terputus. Saya dan suami

bergantian untuk cuci tangan. Setelah itu, kami membuka pembungkus burger masing-masing dan mulai menyantapnya. Kami pun melanjutkan obrolan yang





terpotong tadi.

Obrolan terhenti. Saya kembali mengigit burger yang saya pegang. Burger itu sudah habis setengahnya. Kemudian, pandangan saya memperhatikan struk pesanan kami. Saya baru menyadari sesuatu.

"Burger kita ga ada baconnya ya?" tanya saya ke suami sambil memperlihatkan isi burger yang saya pegang.

"Eh iya ya," suami saya pun ternyata baru menyadarinya.

Tidak terlalu masalah sebenarnya, toh harganya juga sama. Tapi, ada rasa penasaran, bagaimana rasanya burger andalan kami ini kalau ditambah bacon. Akhirnya, suami membawa struk pesanan ke kasir untuk menanyakan tambahan baconnya.

Tidak lama suami kembali, disusul oleh pramusaji. Pramusaji itu melihat sekilas ke meja kami.

"Tunggu sebentar ya, Kak," kata pramusaji. Ia kembali ke dapur.

Kami melanjutkan makan, tetapi kami hanya memakan kentang. Burgernya harus disisakan biar kami masih bisa menikmatinya dengan potongan bacon itu.

Beberapa menit berlalu, pramusaji itu datang membawa nampan ke arah meja kami.

"Maaf, Kak, tadi pesanannya salah," kata pramusaji itu sambil meletakkan nampannya.

"Loh, ini dibuatin burger baru mas?" tanya suami.

Ya, pramusaji itu tidak mengantar tambahan bacon yang seharusnya diselipkan di burger kami. Ia malah mengantar dua burger utuh yang masih terbungkus rapi. Setelah kami bertanya, pramusaji menginfokan kalau ini memang kebijakan dari restoran karena ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Padahal bagi kami, kejadian ini tidak semengganggu itu. Tapi ya sudah, siapa yang bisa menolak mendapat tambahan burger gratis? Alhasil, makan malam pada hari itu menjadi makan termurah kami di restoran itu.

Epilog :

Beberapa bulan kemudian, saya dan suami kembali ke restaurant itu. Ternyata varian baru dari burger itu sudah tidak ada.

Hmmm... Apakah banyak kejadian potongan bacon yang tertinggal seperti kami? •



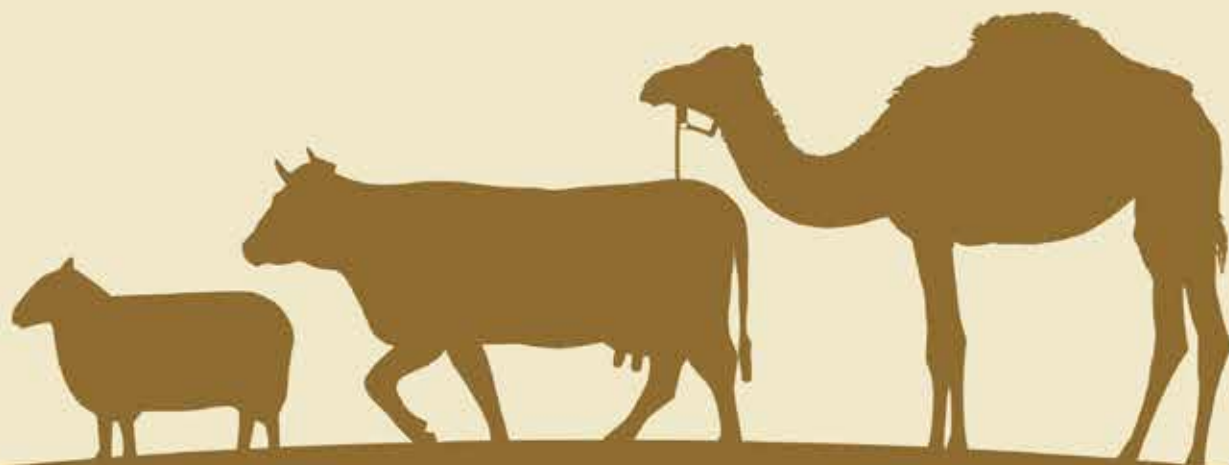
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SUMENEP
MENGUCAPKAN

SELAMAT

IDUL ADHA

1444 hijriyah

“Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah).” (Al-Kautsar ayat 2)





SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA

— 01 Juni 2023 —

